

Kegagalan *Ja-Zenchu* dalam Mempertahankan Kebijakan Proteksionisme Pertanian Jepang Menghadapi *Trans-Pacific Partnership* (TPP)

Swastaji Agung Rahmadi

Abstrak

Sektor pertanian Jepang diwarnai oleh kebijakan proteksionisme yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok petani. Produktivitas yang rendah serta kekuatan politik dari kelompok kepentingan bernama JA-Zenchu menjadi salah satu penyebab eksistensi kebijakan proteksionisme pertanian. Kemenangan partai LDP dalam pemilu tahun 2012 pada mulanya disambut positif oleh masyarakat ekonomi Jepang agar dapat merevitalisasi ekonomi nasional. Namun pada 15 Maret 2013, rezim LDP di bawah PM Shinzo Abe menyatakan secara resmi partisipasi Jepang di dalam negosiasi perdagangan bebas Trans Pacific Partnership yang mengagendakan liberalisasi dan deregulasi seluruh sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor pertanian. Keputusan ini mengejutkan seluruh pemangku kepentingan terutama JA-Zenchu sebagai kelompok kepentingan dari petani. Pertanyaan penelitian yang diajukan oleh artikel ada dua antara lain (1) mengapa JA-Zenchu gagal memengaruhi pemerintah untuk menolak partisipasi Jepang dalam TPP? serta (2) apa implikasi kegagalan JA-Zenchu dalam memengaruhi keputusan Jepang menolak TPP?. Artikel ini akan menggunakan konsep gaiatsu in Japanese policy making oleh Aurelia George Mulgan dalam menganalisis pertanyaan penelitian artikel ini.

Kata Kunci: JA-Zenchu, Trans Pacific Partnership, liberalisasi dan deregulasi pertanian, Gaiatsu.

A. LATAR BELAKANG

Sektor Pertanian Jepang merupakan sektor ekonomi yang paling diproteksi oleh negara. Upaya pemerintah Jepang memroteksi sektor ini adalah dengan menerapkan tarif tinggi pada komoditas pertanian impor serta pemberian subsidi kepada produk petani lokal (Asahi Shimbun, 2011). Preferensi kebijakan proteksi pertanian Jepang ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik suatu kelompok kepentingan yang bernama JA-Zenchu. JA-Zenchu (JA) adalah koperasi petani Jepang yang berdiri pada

tahun 1952. Tujuan utamanya adalah untuk menyuarakan kepentingan petani melalui perumusan kebijakan pertanian di ranah politik. JA merupakan salah satu kelompok kepentingan berafiliasi politik terbesar di Jepang dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 10 juta petani seluruh Jepang (JA-Zenchu, 2013).

Shinzo Abe dari Liberal Democrat Party (LDP) terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 2012. Kemudian, PM Abe mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi yang disebut dengan *Abenomics* yang memiliki tiga paket kebijakan yaitu, stimulus fiskal, pengetatan

moneter dan reformasi struktural. Khusus reformasi struktural, pemerintah menerapkan deregulasi di berbagai sektor ekonomi termasuk pertanian. Deregulasi ini ditempuh melalui keterlibatan Jepang pada berbagai pakta perdagangan bebas baik bilateral, regional, maupun multilateral. Pada tanggal 15 Maret 2013, Jepang resmi menjadi anggota perundingan perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP) (The Economist, 2013). Dalam perspektif politik, TPP adalah justifikasi PM Abe untuk menerapkan kebijakan reformasi strukturalnya. Keputusan ini mengejutkan kelompok petani yang menganggap partisipasi Jepang dalam TPP mengancam pertanian lokal (Mulgan, 2003).

Konsekuensi dari partisipasi Jepang dalam TPP adalah menaati norma-norma perdagangan yang berlaku. Padahal, salah satu dari norma perdagangan yang diatur yakni tentang liberalisasi sektor pertanian. Keputusan resmi partisipasi Jepang dalam perundingan TPP mengindikasikan bahwa kepentingan kelompok petani dikorbankan demi merealisasi stimulus ekonomi. Maka dari itu, artikel ini akan menganalisis penyebab kegagalan kelompok petani (JA-Zenchu) untuk mempertahankan kebijakan proteksi pertanian menjelang keputusan resmi asesi Jepang dalam TPP serta implikasi TPP bagi kelompok petani.

B. KONSEP GAIATSU (FOREIGN PRESSURE IN JAPANESE AGRICULTURAL POLICY MAKING)

Proses perumusan kebijakan luar negeri Jepang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni baik yang berasal dari aktor domestik di dalam subsistem politik Jepang sendiri maupun berasal dari dorongan atau tekanan eksternal negara lain yang menghendaki kepenting-

an strategisnya berhasil memengaruhi pemerintah Jepang. Sistem politik Jepang adalah wadah kontestasi politik antara aktor domestik dengan pihak eksternal dalam setiap proses perumusan kebijakan negara. Kontestasi politik ini akan memunculkan dua kemungkinan. Pertama, terdapat pihak yang menang dalam mewujudkan kepentingannya. Kedua, terdapat pula pihak yang gagal memengaruhi proses pertimbangan politik pemerintah beserta konsekuensi yang akan diterimanya (Putnam, 1998).

Proses pembuatan kebijakan pertanian Jepang menghadapi kondisi yang sulit karena harus menghadapi tekanan eksternal (*gaiatsu*) dan tekanan internal (*naiatsu*). *Gaiatsu* menjadi fitur khas dalam pola politik luar negeri Jepang yang selalu diiringi oleh kepentingan asing untuk meminta Jepang mengubah kebijakannya. Tekanan eksternal ke Jepang berasal dari sejumlah faktor, antara lain aliansi pertahanan Amerika Serikat dengan Jepang dan rumitnya interdependensi Jepang dengan ekonomi global. *Gaiatsu* merupakan tantangan terbesar bagi rezim proteksionis pertanian Jepang. Dalam kasus ini, pemerintah Jepang cenderung defensif dalam memperjuangkan kepentingan petaninya di setiap perundingan TPP. Tanpa adanya tekanan eksternal, liberalisasi pertanian sulit terjadi di Jepang, bahkan dapat te-realisasi dalam jangka waktu yang sangat lama (Mulgan, 2003).

Dengan adanya pengaruh dari *gaiatsu*, pemerintah Jepang justru dapat mengimplementasi agenda reformasi pertanian yang selama ini kurang populer bagi kelompok petani. Liberalisasi pertanian melalui TPP dapat mempercepat proses penyesuaian kebijakan pertanian domestik. *Gaiatsu* dapat berkompromi dengan aktor domestik

(*naiatsu*) sebagai pihak yang terlibat secara langsung di dalam proses pembuatan kebijakan pertanian Jepang. Selain itu, *Gaiatsu* juga sanggup memanipulasi kepentingan konstituen domestik supaya tetap sejalan dengan kepentingannya. *Gaiatsu* ikut serta memperjaungkan kepentingan pihak yang menjadi “korban” pada proteksi pertanian, seperti serikat industri dan kelompok konsumen. Hal ini dilakukan supaya terbentuk koalisi politik antara *gaiatsu* dan *naiatsu* untuk melawan kekuatan proteksionisme pertanian (Mulgan, 2003).

C. JA-ZENCHU DAN POLITIK AGRIKULTUR JEPANG

Salah satu aktor dominan dalam sistem pertanian Jepang adalah JA-Zenchu. JA-Zenchu atau biasa disebut dengan JA adalah koperasi pertanian yang ada sejak era Meiji. Pada era Meiji, kelompok ini dalam Bahasa Jepang disebut juga dengan *nokyo*. JA-Zenchu (Central Union of Agricultural Cooperatives) adalah sebuah koperasi pertanian Jepang yang didirikan di Tokyo pada 1952. Tujuan dasar dari JA-Zenchu adalah berkontribusi pada perumusan kebijakan pertanian pemerintah dan membantu peningkatan kesejahteraan petani. Organisasi ini memainkan berbagai fungsi antara lain pemasaran komoditas pertanian hingga membantu preferensi kebijakan pertanian. Jumlah anggota JA-Zenchu adalah lebih dari 10 juta orang. Hal ini membuat JA-Zenchu menjadi kelompok kepentingan terbesar di Jepang. JA juga memiliki struktur koordinasi organisasi yang disiplin (JA-Zenchu, 2013).

Dalam kacamata politik, JA berfungsi sebagai *voter machine* bagi politisi yang memobilisasi petani Jepang untuk terus mendukung partai politik konservatif yakni Liberal Democratic Party

(LDP). Walaupun fokus pergerakan *no-kyo* adalah di sektor pertanian, namun unit usahanya ada di sebagian besar sektor ekonomi. Aset kekayaan JA meliputi unit bisnis asuransi dan finansial (Bank Norinchukin). Bank Norinchukin berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Jepang terutama wilayah pedesaan yang berbasis pertanian. Pada masa kini, Bank Norinchukin merupakan bank kreditor yang rutin membeli surat utang pemerintah (*bond buying*) sebagai salah satu sumber fiskal bagi APBN Jepang. Peran aktif JA beserta unit bisnisnya tersebut meningkatkan posisi tawarnya di mata pemerintah Jepang, sehingga pemerintah sangat memperhatikan kepentingan JA dengan menawarkan preferensi kebijakan yang menguntungkan. JA merupakan hambatan politik terbesar di dalam liberalisasi sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian hanya menyumbang satu persen PDB Jepang, namun relasi politik antara JA dengan LDP menjadikannya sebagai kelompok kepentingan yang berpengaruh di Jepang (Nochubank, 2013).

Kebijakan pertanian Jepang dibuat melalui proses politik yang panjang. Proses tersebut melalui konsensus di antara kelompok kepentingan, lembaga birokrasi (MAFF) dan partai politik (pemerintah) melalui *diet* (parlemen). Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pertimbangan apakah suatu kebijakan akan berpengaruh besar pada elektabilitas partai politik. Relasi ketiga entitas politik tersebut digambarkan sebagai “*iron triangle*” yang memiliki kepentingan dan hubungan timbal balik. Pembahasan mengenai politik domestik Jepang sangat erat kaitannya dengan interaksi yang terjalin antara lembaga birokrasi (kementerian), politisi di *diet*, dan kelompok lobi pertanian (JA-Zenchu). Hubungan interaksi politik antara tiga

entitas politik tersebut disebut dengan *iron triangle*. Konsep tersebut menjelaskan bahwa ketiga elit tersebut memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda-beda dan diwakili melalui proses pembuatan kebijakan (Colignon, 2001).

JA mendorong perwakilan politiknya di *diet* untuk tetap mempertahankan kebijakan proteksi pada lima komoditas pertanian antara lain, beras, gandum, daging babi dan sapi, gula serta produk olahan susu. Walaupun JA menolak liberalisasi perdagangan TPP, namun timbul perbedaan pendapat dari petani anggotanya. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran petani akan tiga masalah utama kondisi pertanian Jepang antara lain,

- 1) banyaknya petani yang memasuki usia tidak produktif (*aging farmer*),
- 2) urbanisasi yang mendorong angkatan tenaga kerja produktif di pedesaan beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di perkotaan,
- 3) perubahan gaya hidup masyarakat Jepang yang mendorong diversifikasi kebutuhan pangan.

Fakta lain membuktikan bahwa hanya tujuh dari 47 kantor cabang prefektural JA yang menolak keputusan partisipasi dalam TPP. Sedikitnya penolakan TPP tersebut mengindikasikan perubahan paradigma petani Jepang yang kini lebih memilih liberalisasi dibandingkan ketergantungan mereka dengan subsidi pemerintah. Petani Jepang saat ini menghendaki reformasi pertanian agar lebih fokus ke produk pangan bernilai tambah (Bloomberg, 2013).

D. TUNTUTAN INTERNASIONAL DALAM LIBERALISASI PERTANIAN JEPANG

Tekanan eksternal (*gaiatsu*) menjadi tantangan terbesar bagi kebijakan proteksi pertanian Jepang. Tekanan eksternal terbesar bagi rezim perdagangan Jepang berasal dari AS. Tekanan eksternal tersebut disalurkan melalui proses negosiasi baik bilateral maupun multilateral.

1. Pengaruh Amerika Serikat

Partisipasi Jepang dalam TPP penting bagi AS. Dengan partisipasi Jepang, sumbangan produk domestik bruto (PDB) negara-negara TPP mencapai hampir 40 persen PDB global, serta 33 persen dari volume perdagangan global. Jepang adalah mitra dagang terbesar ke empat bagi AS setelah Uni Eropa, Kanada dan Meksiko. Kepentingan AS mengundang partisipasi Jepang adalah akses pasar bagi produk pertanian AS serta penghapusan hambatan tarif maupun nontarif seperti izin impor, subsidi, kuota, regulasi. Pada tahun 2013, nilai ekspor produk pertanian AS ke negara TPP berjumlah 58 miliar dolar. Dua puluh lima persen dari penghasilan petani lokal AS diperoleh melalui ekspor. Kelompok kepentingan di AS yang mendukung asesi Jepang dalam TPP antara lain, *The National Association of Manufacturers, The U.S. Chamber of Commerce, The Emergency Committee for American Trade, US-Japan Business Council, The American Farm Bureau Federation, The Business Roundtable* dan *The Coalition of Service Industries*. Mereka meminta pemerintah AS menjadikan TPP sebagai perjanjian "WTO-plus" yang meliputi perdagangan bebas segala sektor ekonomi (USTR, 2013).

Amerika Serikat membutuhkan Je-

pang sebagai aktor strategis untuk menjembatani kepentingannya yang lebih luas di Asia-Pasifik (*American Pivot to Asia*). Bagi pemerintah Jepang, tekanan eksternal ini bersifat dilematis karena di satu sisi, pemerintah tidak ingin kehilangan dukungan politik dari kelompok pertanian. Di sisi lain, pemerintah Jepang ingin membawa pengaruh asing ke dalam politik domestik sebagai kata-lis merealisasikan reformasi pertanian.

Perbedaan kepentingan tersebut berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan kepentingan kedua pihak yaitu,

- a. Kedua negara memiliki *common interest* untuk meningkatkan perdagangan kedua negara dalam ikatan perdagangan bebas TPP,
- b. AS dan Jepang menyepakati bahwa lima komoditas tersebut adalah sektor sensitif bagi Jepang dan tetap terus menjadi obyek negosiasi di masa depan,
- c. Tuntutan AS kepada Jepang untuk mereformasi sektor pertanian dikabulkan oleh pemerintah Jepang sebagai upaya resiprositas dari kelonggaran AS yang menerima eksklusif lima komoditas pertanian Jepang.

Posisi tawar AS di perundingan TPP sangat besar. Besarnya posisi tawar tersebut disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi AS adalah yang terbesar di dunia sehingga AS lebih dominan dalam menentukan arah perundingan TPP. Amerika Serikat juga melobi negara-negara eksportir pertanian utama di TPP seperti Selandia Baru, Australia, Meksiko untuk sama-sama menekan Jepang. AS memanfaatkan situasi destabilitas geopolitik Asia Timur akibat agresivitas

Tiongkok dengan menawarkan jaminan politik dan keamanan kepada Jepang. Sebagai gantinya, AS meminta Jepang untuk menaati kesepakatan TPP akan liberalisasi pertanian. Fenomena politik ini disebut dengan *assymetrical neoliberal FTA model* (Dent, 2007).

2. Norma Perdagangan dalam TPP

Pada 8 November 2006, Brunei Darussalam, Chile, Singapura dan Selandia Baru membentuk suatu pakta perdagangan bebas yang disebut dengan *Pacific Four* (P4). Pacific Four memiliki tujuan untuk menurunkan semua tarif perdagangan di antara negara anggota efektif sejak 1 Januari 2015. Anggota P4 ini memiliki ambisi untuk mengundang partisipasi negara ekonomi besar di Asia Pasifik, seperti AS, Rusia, Tiongkok, Jepang, dan Indonesia yang dikemukakan pada KTT APEC tahun 2006 di Hanoi-Vietnam. Pada tahun 2008, AS, Vietnam, Peru dan Australia menyatakan diri keterlibatannya pada perluasan anggota pakta perdagangan bebas P4, yang disebut juga dengan istilah TPP. TPP lahir sebagai pakta perdagangan bebas multilateral yang keanggotaannya meliputi negara-negara Asia Pasifik. Negara anggota TPP yang berjumlah 12 memiliki kombinasi jumlah populasi sebagai pasar konsumen sebesar 793 juta jiwa, dengan jumlah produk domestik bruto sebesar 28,1 triliun dolar AS atau setara dengan 39 persen PDB global (Krist, p.5).

Dengan sistem keanggotaan yang terbuka, TPP menjadi satu-satunya regionalisme yang paling cepat berkembang. TPP memasukkan klausa bahwa negara lain dapat bergabung sewaktu-waktu di masa depan dengan tujuan agar TPP dapat mempercepat integrasi ekonomi regional (Fergusson, 2013). Terdapat empat hal yang membedakan

TPP dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya di kawasan ini. Pertama, Amerika Serikat memimpin negosiasi dari blok perdagangan ini. Kedua, keanggotaan TPP melingkupi kedua sisi dari Pasifik. Ketiga, TPP dapat menjadi langkah awal dalam merealisasikan tujuan dari Deklarasi Bogor untuk membentuk sebuah *Free Trade Area in Asia and the Pacific* (FTAAP). Keempat, ketika Jepang bergabung dengan negosiasi TPP pada Maret 2013, pentingnya TPP menjadi semakin meningkat, dan menarik perhatian negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Empat hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting yang membuat negara-negara anggota TPP memutuskan untuk bergabung.

Komponen negosiasi dalam TPP berisikan hal-hal di luar isu tradisional yang belum secara ketat diatur dalam WTO, seperti perdagangan jasa, isu buruh, isu lingkungan, serta hak kekayaan intelektual (TRIPs), *rules of origins* (RoO), *supply chain management*, dan kebijakan kompetisi, aturan investasi (TRIMs), pengadaan pemerintah, koherensi peraturan, serta usaha kecil dan menengah, hingga mekanisme *investor-state dispute settlement*. Regulasi tersebut diwujudkan ke dalam 29 bab yang kini tengah dinegosiasikan oleh para anggota TPP. TPP menerapkan prinsip *single undertaking measures* ketika suatu perjanjian akan ditandatangani apabila semua hal telah mencapai kesepakatan (Cheong, 2013).

Walaupun GATT telah sukses untuk menurunkan hambatan tarif pada perdagangan barang sejak 1948, sektor pertanian selalu menjadi sektor yang mendapatkan perlakuan khusus di setiap perundingan yang berlangsung di GATT. Namun, perundingan liberalisasi sektor pertanian tidak pernah berkelan-

jutan hingga Putaran Uruguay sejak 1986 s.d. 1993. Kesepakatan Putaran Uruguay terkait aturan pertanian (*Agreement on Agriculture*) merupakan upaya awal untuk meningkatkan akses pasar dan berusaha untuk menghapus sistem subsidi pertanian yang masih diterapkan oleh negara-negara. Namun, TPP justru menekankan pada akses pasar dan liberalisasi sektor pertanian (Elms, pp.106-109). Jepang memulai negosiasi TPP dari posisi yang lemah sehingga harus menerima aturan-aturan yang telah disepakati oleh 10 negara anggota TPP lainnya. Jepang tidak dapat melihat laporan rinci tentang hasil perundingan TPP sebelumnya. Norma-norma dalam TPP ini bersifat *legally binding* sehingga kesepakatan TPP wajib diratifikasi oleh negara-negara anggota ke dalam sistem hukum domestik (Japan Times, 2013).

E. DUKUNGAN KEIDANREN JEPANG PADA TPP

Terdapat kelompok kepentingan domestik Jepang yang mendukung TPP yaitu *Keidanren*. *Keidanren* adalah serikat bisnis dan industri Jepang yang memandang TPP sebagai peluang besar atas akses pasar di negara-negara yang saat ini masih menerapkan tarif tinggi bagi produk ekspor Jepang. Dukungan *keidanren* terhadap asesi Jepang dalam TPP ialah sebagai berikut,

- a. Pengurangan tarif pada semua item perdagangan dapat meningkatkan daya saing ekspor Jepang serta mencegah hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara mitra dagang sebagai pasar bagi industri Jepang,
- b. Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural terutama sektor pertanian Jepang agar lebih kom-

petitif. Produktivitas pertanian Jepang saat ini hanya bernilai depalan triliun yen. Dengan demikian, reformasi pertanian adalah solusinya. *Keidanren* siap membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan memperbaiki manajemen sektor pertanian Jepang.

Dukungan *keidanren* menjadi faktor penguat motif pemerintah untuk bergabung dalam TPP. Sebab, kepentingan *keidanren* ini selaras dengan motif reformasi struktural pemerintah. Sehingga, PM Abe memiliki justifikasi yang cukup kuat untuk menyatakan resmi partisipasi Jepang ke dalam TPP. *Keidanren* juga telah berhasil meyakinkan JA-Zenchu pihaknya siap membantu petani lokal untuk meningkatkan daya saing produk pertanian lokal, apabila TPP secara legal diratifikasi oleh *diet* dan efektif berlaku di Jepang (*Keidanren*, 2011).

F. Dinamika Politik Agrikultur dalam Pemerintah Jepang

Setiap lembaga pemerintah di Jepang mengejar kepentingan mereka sendiri dalam menyikapi TPP. Absennya sistem koordinasi terpusat antarbirokrasi mengindikasikan bahwa pemerintah sulit mempertimbangkan posisi yang sama (*win-set solution*) pada perundingan TPP. Jepang membutuhkan otoritas yang berkuasa penuh sebagai wakil Jepang dalam negosiasi perdagangan internasional, seperti *United States Trade Representatives* yang dimiliki oleh Amerika Serikat. MAFF (Kementerian Pertanian) menginginkan tetap adanya proteksi pada lima komoditas pertanian, sedangkan MOF (Kementerian Keuangan) menginginkan reformasi struktural pertanian dengan menghapus subsidi pertanian yang sangat membebani ru-

ang fiskal. Di sisi lain, METI yang dekat *keidanren* mengharapkan liberalisasi penuh pada setiap item perdagangan di dalam TPP (*Mulgan*, 2011).

Bedasarkan data dari MAFF, TPP akan mengurangi produktivitas pertanian Jepang sebesar 4,1 triliun yen. Menurut Menteri Pertanian Jepang, Yoshimasa Hayashi, reformasi struktural akan melemahkan pengaruh JA. Rencananya, peran JA akan diganti oleh organisasi bisnis pertanian yang polanya mirip seperti *keidanren*. MAFF mempertanyakan peran JA yang pada awalnya ingin meningkatkan penghasilan petani, namun tetap menolak liberalisasi. MAFF ingin JA harus melakukan reformasi struktural internal. MAFF di bawah kabinet Shinzo Abe mulai melunak dengan agenda liberalisasi pertanian (*Japan Times*, 2012).

METI (Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri) menyatakan bahwa industri otomotif Jepang akan menghemat pengeluaran sebesar 137 miliar yen akibat tingginya tarif impor pada sembilan negara yang terlibat dalam negosiasi TPP. Jumlah pembayaran tarif tersebut mewakili sekitar 10 persen dari laba operasi gabungan dari mobil Jepang. Dampak dari TPP pada industri Jepang berdasarkan proyeksi oleh METI dijelaskan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh DPJ pada 4 November 2013. Jika Jepang bergabung dengan TPP, kinerja ekspor industri otomotif akan meningkat. Namun, METI mewaspadai kebijakan proteksionisme otomotif yang masih diterapkan oleh Malaysia dan AS. Amerika Serikat membatasi impor produk otomotif asing, termasuk asal Jepang. Sedangkan, Malaysia menerapkan kebijakan spesialisasi penggunaan mobil nasional dan membatasi investasi asing (*Asahi Shimbun*, 2011).

Bagi MOFA (Kementerian Luar Negeri Jepang), *Japan-Australia Economic Partnership Agreement* (JAEPA) lebih menjadi prioritas kebijakan ekonomi internasional MOFA dibandingkan dengan TPP. MOFA juga mempertimbangkan asumsi JA yang menyatakan bahwa Australia lebih mudah menerima kelonggaran tingkatan liberalisasi sektor pertanian di JAEPA dibandingkan AS dalam TPP. Dalam kerangka JAEPA ini, Australia tidak memaksa Jepang untuk mengeliminasi total tarif komoditas pertanian hingga. Australia menerima opsi pengurangan tarif secara berkala hingga 20 tahun pasca-efektifnya JAEPA. Australia juga menerima permintaan Jepang untuk mengurangi tarif otomotif asal Jepang, dan mengajak Jepang untuk menginvestasikan industri otomotif di Australia. Kesepakatan JAEPA ini dipandang oleh MOFA lebih realistis dan menguntungkan kedua belah pihak. MOFA juga mengapresiasi langkah akomodatif dari PM Australia Tony Abott dalam berkompromi merundingkan JAEPA, berbeda dengan apa yang Amerika Serikat lakukan.

MOFA berpendapat bahwa jika Jepang mampu mengamankan pengecualian tarif pertanian dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Australia adalah mungkin bagi Jepang untuk mempertahankan pengecualian yang sama di dalam TPP. MOFA menyangkan TPP tidak disertai oleh negara mitra dagang terbesar Jepang, seperti Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, Indonesia dan Filipina. Sedangkan, negara Asia anggota TPP antara lain, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Brunei memiliki PDB yang sangat kecil dan Jepang mengalami defisit perdagangan dengan mereka. Negara tersebut juga bukan basis pasar ekspor terbesar Jepang (Nikkei Business, 2011). Hal ini menyiratkan bahwa

MOFA kurang memprioritaskan perundingan TPP sebagai agenda utama kebijakan luar negeri Jepang.

Hal yang dapat dipetik adalah bahwa setiap lembaga birokrasi memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam perundingan TPP. Dalam perundingan TPP, terdapat empat kementerian yang paling memengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam menanggapi TPP, antara lain METI, MAFF, MOF, MOFA. METI yang mewakili kepentingan industri sangat mendukung TPP sebagai upaya peningkatan daya saing industri Jepang di pasar regional. MAFF yang mewakili kelompok petani pada awalnya menentang keras partisipasi Jepang dalam TPP, sebab keterwakilan elit JA di berbagai jabatan strategis di MAFF, sehingga MAFF terus memperjuangkan kepentingan petani. Di MOF, lembaga ini sangat mendukung TPP sebagai awal mula reformasi struktural sektor pertanian yang saat ini masih membebani APBN Jepang. Reformasi struktural ini diperkirakan oleh MOF akan menghapus sistem gentan, *food control price* di mana negara harus menanggung anggaran yang sangat besar bagi subsidi petani lokal. MOFA lebih memprioritaskan perdagangan bebas Jepang secara bilateral ketimbang multilateral seperti TPP, sebagai contoh *Japan-Australia Economic Partnership Agreement* (JAEPA).

G. ANALISIS PROSES PERTIMBANGAN KEPUTUSAN TPP OLEH JEPANG.

Inisiator keinginan partisipasi Jepang di dalam TPP pertama kali lahir dari pernyataan PM Yoshihiko Noda. Alasan PM Noda untuk mengikutsertakan Jepang dalam TPP adalah bahwa Jepang merupakan negara yang sangat bergantung pada perdagangan interna-

sional. Perdagangan internasional bersifat vital dan berpengaruh dalam pola kebijakan luar negeri Jepang. PM Noda yakin bahwa semakin berkurangnya hambatan perdagangan internasional, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Jepang. Motif lainnya adalah Jepang ingin menguatkan hubungan aliansi Jepang-AS di tengah masalah regional persengketaan Pulau Senkaku/Diaoyu antara Jepang dengan Tiongkok. Pada era kepemimpinan Noda, Jepang memulai tahap konsultasi perdagangan bebas TPP dengan negara anggota TPP. Keputusan politik Jepang untuk bergabung dalam TPP menjadi dilema politis bagi Noda dan partai DPJ. Penyebabnya adalah di satu sisi, Noda ingin mengeluarkan Jepang dari resesi ekonomi melalui pakta perdagangan bebas. Pada saat yang sama, partai oposisi yakni LDP mengkritik keras rencana kebijakan partisipasi Jepang dalam TPP yang menyertakan semua lini perdagangan. LDP mendesak Noda untuk tetap melindungi tiga sektor dari liberalisasi, antara lain asuransi, sektor pertanian, dan industri otomotif (Asahi Shimbun, 2011).

Kelompok petani tidak memiliki pilihan lain, karena baik *Japan Restoration Party* dan *Your Party* mendukung realisasi TPP. DPJ tidak lagi memiliki kredibilitas dalam mengelola isu TPP ini, akibat perpecahan internal partainya. Sektor internal DPJ di bawah kepemimpinan Noda mengalami segmentasi antara faksi yang pro-TPP dengan faksi yang kontra-TPP. Di pihak lain, partai politik yang menolak TPP, seperti *People's Life Party*, *Japan Communist Party*, *Social Democratic Party* dan *Green Wind Party* semuanya adalah partai kecil secara elektoral. Perpecahan internal di DPJ tersebut berdampak pada mundurnya enam anggota *diet* dari DPJ. Akibatnya, komposisi kursi

partai pemerintahan yang dipimpin oleh DPJ menjadi tidak seimbang ketika partai oposisi menduduki perwakilan mayoritas. Hal ini menjadi kesempatan partai oposisi (LDP) untuk menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet Yoshihiko Noda. Akhirnya, langkah Noda untuk mewujudkan keanggotaan Jepang di dalam perdagangan bebas TPP harus berhenti seiring dengan bubarnya kabinet Noda pada 26 Desember 2012 (Mulan, 2013).

Shinzo Abe terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang menggantikan Yoshihiko Noda pada Desember 2012. Terpilihnya Abe menimbulkan reaksi positif dari rakyat dan komunitas bisnis yang mengharapkan Abe dapat menyelamatkan ekonomi nasional dari resesi berkepanjangan. Abe memiliki rencana restrukturalisasi ekonomi Jepang dengan mengeluarkan *Abenomics* yang memiliki tiga strategi antara lain, paket stimulus fiskal, pengetatan moneter, dan reformasi struktural. Paket stimulus fiskal dan rencana pengetatan moneter telah berjalan, namun strategi ketiga yakni reformasi struktural masih menghadapi tantangan. Reformasi struktural *Abenomic* menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi dengan liberalisasi sektor ekonomi yang selama ini mendapatkan proteksi, seperti sektor pertanian. Liberalisasi dan reformasi struktural pertanian diraih dengan partisipasi Jepang dalam pakta perdagangan bebas TPP. Selain dari peluang ekonomi dari perdagangan bebas TPP, Abe juga berharap bahwa bergabungnya Jepang di dalam TPP akan memberikan faktor penguat motif politik pemerintah untuk memulai program reformasi struktural (Robles, 2013).

Keputusan pemerintahan Abe untuk bergabung dalam negosiasi TPP adalah

strategi politik untuk melaksanakan agenda reformasi struktural yang masih sensitif bagi masyarakat Jepang. Reformasi struktural ini adalah pilar ketiga dari *Abenomics*. Abe telah melaksanakan dua strategi *Abenomics* antara lain, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter Abe dibuktikan oleh keputusan bank sentral Jepang yang secara agresif mengeluarkan paket ekonomi untuk memerangi deflasi. Pemerintahan Abe juga telah mengeluarkan paket stimulus fiskal untuk membantu industri Jepang dalam meningkatkan produktivitasnya. Strategi ketiga *Abenomics* yakni reformasi struktural tetap menjadi prioritas Abe. Reformasi struktural ekonomi yang paling kontroversial adalah reformasi di sektor pertanian. Sektor pertanian Jepang menikmati berbagai subsidi, pengaturan harga dan preferensi kebijakan dari pemerintah (Gobel, Jakarta Post 2014).

Pihak yang menentang masuknya Jepang dalam TPP adalah LDP. Karena, kemenangan elektoral LDP dipengaruhi banyak oleh dukungan kelompok petani yang anti-TPP. Namun, mengapa PM Abe secara mengejutkan menyatakan secara resmi partisipasi Jepang dalam TPP pada 15 maret 2013? Pada awalnya, jumlah suara di Majelis Tinggi Diet yang menolak TPP adalah sebesar 60 persen. Namun, setelah PM Abe menyelenggarakan rapat konsolidasi internal LDP terkait TPP, faksi tersebut mengubah pandangan mereka terhadap TPP. LDP akan terus berjuang untuk melindungi kepentingan petani sebagai basis utama pendukungnya, dan juga mengecualikan lima kategori komoditas pertanian dari perundingan TPP, antara lain beras, gandum, daging sapi dan babi, gula serta produk olahan susu (Mulgan, 2013). Shinzo Abe dan faksi LDP yang pro-TPP menguatkan aliansi politiknya dengan partai koalisi,

yakni *New Komeito* untuk mendukung pemerintah dalam mejajaki keputusan partisipasi Jepang dalam TPP. Hasilnya adalah *New Komeito* mendukung penuh langkah pemerintah bergabung dalam TPP. Menurut *New Komeito*, Shinzo Abe memiliki rekam jejak yang baik pada pengelolaan ekonomi nasional (Hanson, The Diplomat 2013).

Partai DPJ menyetujui langkah kabinet Shinzo Abe untuk melanjutkan perundingan TPP, namun dengan syarat sektor pertanian tetap dilindungi dari liberalisasi. Pemerintahan Abe berharap TPP dapat menjadi instrumen revitalisasi ekonomi Jepang menjadi lebih terbuka, kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. TPP juga dapat mengikis pengaruh kekuatan proteksionis di politik domestik, terutama kelompok petani. Setelah berjalannya perdebatan internal di dalam LDP, pada pertengahan Maret 2013, anggota diet dari LDP secara resmi mendukung keputusan Abe untuk bergabung dalam TPP. Dukungan tersebut berbentuk resolusi *diet*. Resolusi diet ini mempertimbangkan aksi penolakan JA, dengan mengabulkan permintaan JA untuk tetap menjadikan lima kategori produk pangan tersebut sebagai komoditas yang wajib dilindungi pemerintah dalam negosiasi TPP (Solis, Brookings 2013).

Resolusi Diet ini dibentuk oleh komite diet yang anggotanya berasal dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari serikat bisnis, kelompok petani, jajaran birokrasi, dan partai politik koalisi pemerintah Abe. Resolusi ini bertujuan untuk membentuk konsensus terkait rencana kebijakan pemerintah untuk bergabung dalam TPP. Resolusi Diet tersebut berisi antara lain,

Pemerintah diperbolehkan untuk melanjutkan perundingan TPP dengan

tetap mempertahankan isu sensitif yakni pantangan liberalisasi lima komoditas pertanian (beras, gandum, daging sapi dan babi, produk olahan susu serta gula). Keputusan ini sesuai dengan permintaan JA dan MAFF yang menginginkan eksklusi lima komoditas pertanian dari liberalisasi TPP. Apabila pemerintah merasa tidak mampu eksklusi ini, pemerintah harus segera keluar dari perundingan TPP.

Sektor pertanian perlu direformasi agar dapat bersaing di pasar global, terutama menghadapi realisasi TPP. Reformasi struktural pertanian berwujud pada upaya restrukturisasi JA-Zenchu. Resolusi *diet* ini selaras dengan rencana implementasi pilar ketiga *abenomic* untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Pemerintah mengizinkan perusahaan nonpertanian dalam kegiatan bisnis pertanian yang selama ini hanya diperbolehkan bagi kelompok petani saja. Hal ini sesuai dengan kepentingan *keindanren* untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian supaya lebih kompetitif di persaingan global.

Kabinet Abe diminta untuk merundingkan TPP secara bilateral daripada multilateral, agar kepentingan Jepang lebih mudah terakomodasi. Amanah *diet* ini juga dapat menanggulangi dominasi kepentingan eksternal dalam rezim perdagangan Jepang (Nippon Sangi-in).

Liberalisasi perdagangan melalui TPP adalah strategi terbaik bagi pemerintahan Abe untuk membawa agenda reformasi struktural “*abenomics*” dengan menyalahkan “pengaruh asing yang membuat kita untuk melakukannya”. Itu adalah taktik pemerintah Jepang untuk mengatasi resistensi domestik (JA-Zenchu) dalam melancarkan program reformasi pertanian. Keber-

hasilan pemerintahan Abe dalam merealisasikan perdagangan bebas Jepang-Australia yang membatasi liberalisasi beras, gandum, dan produk olahan susu menjadi pertimbangan untuk mendorong pembatasan serupa di perundingan TPP. Baik JA-Zenchu maupun *keidanren* merupakan kelompok kepentingan yang memiliki hubungan dekat dengan partai politik (LDP). Kedua kelompok tersebut adalah basis massa elektoral LDP. Langkah politis Abe ini disepakati dalam sebuah resolusi diet. Resolusi Diet tersebut adalah keputusan yang paling solutif dan disepakati oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal yang dapat digaris bawahi adalah bahwa pemerintahan Shinzo Abe berhasil melancarkan reformasi struktural pertanian tanpa harus khawatir merugikan salah satu kepentingan konstituen domestiknya.

H. IMPLIKASI TPP PADA JA-ZENCHU

Pada bab ini, artikel akan menjelaskan mengenai implikasi kegagalan JA-Zenchu dalam memenangkan kontestasi politik di dalam proses pertimbangan keputusan, akankah pemerintah Jepang menerima atau menolak opsi bergabung dalam perundingan *trans-pacific partnership*. Kegagalan ini menyebabkan pemerintah Jepang pada akhirnya menyetujui untuk bergabung dalam negosiasi TPP pada 15 Maret 2013 lalu. Walaupun secara politik, belum terlihat dampak pada penurunan dukungan elektoral oleh kelompok petani kepada partai penguasa LDP, Kegagalan JA-Zenchu dalam melobi pemerintah memiliki konsekuensi berupa dampak reformasi struktural maupun dampak politis. Terdapat dua hal utama yang menggambarkan implikasi kegagalan JA-Zenchu, antara lain tuntutan reformasi struktural JA-Zenchu.

Mayoritas masyarakat Jepang paham bahwa sistem proteksi pertanian lokal saat ini justru malah membebani pengeluaran mereka. Masyarakat Jepang sebagai konsumen meminta perlindungan pemerintah atas hak pemenuhan kebutuhan pangan. Konsumen Jepang menyetujui langkah pemerintah PM Shinzo Abe untuk mereformasi sektor pertanian ke arah liberalisasi. Dengan adanya liberalisasi, konsumen berharap produk impor yang bermutu tinggi akan mudah didapatkan di pasar domestik tanpa harus dibebani oleh pajak impor yang tinggi. Walaupun masyarakat masih lebih memilih produk pertanian premium Jepang, namun mereka sangat terbuka dengan produk impor karena mereka lebih memiliki banyak pilihan (Posen, Nikkei 2014). Apabila kesepakatan TPP berhasil mencapai tahap ratifikasi di parlemen nasional, maka hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Jepang sebagai konsumen. Namun sebaliknya, TPP dapat berimplikasi buruk kepada kelompok petani yang diwakili oleh JA-Zenchu yang khawatir produk mereka kalah bersaing dengan produk impor sejenis dari negara lain.

Negosiasi TPP yang sedang berlangsung menempatkan JA dalam posisi yang lemah. Liberalisasi sektor pertanian kemungkinan akan berlanjut di masa mendatang. Agenda reformasi oleh Shinzo Abe ini memiliki implikasi serius terhadap sektor pertanian. TPP akan membuat pertanian skala kecil semakin meninggalkan JA. Dalam jangka panjang, pemerintah akan mengurangi preferensi kebijakan kepada JA. Pada 5 November 2013, Parlemen Jepang meratifikasi UU Konsolidasi Pertanian yang berisi tentang kebebasan hak guna lahan pertanian kepada semua entitas perusahaan, tidak hanya eksklusif milik golongan petani saja. Parlemen memberikan ke-

sempatan akan reformasi struktural pertanian. UU Konsolidasi Pertanian tersebut kemudian direspon oleh badan eksekutif untuk membentuk *The Council for Regulatory Reform*, sebuah satuan kerja pemerintah untuk menghapus sistem subsidi pertanian (*gentan*) secara bertahap hingga 31 Maret 2019. Penghapusan *gentan* akan memperluas ruang fiskal Jepang.

Partisipasi Jepang dalam TPP berimplikasi terhadap JA. Organisasi ini kemudian mengeluarkan inisiatif paket kebijakan reformasi pertanian internal. Paket reformasi ini berisi langkah-langkah khusus yang ditempuh oleh JA untuk menopang daya saing komoditas pertanian nasional, mempromosikan diversifikasi bisnis pertanian, serta meningkatkan investasi dan pinjaman modal petani, supaya pendapatan mereka lebih meningkat. Paket kebijakan yang akan dilaksanakan oleh JA-Zenchu antara lain, (1) JA akan mengucurkan modal usaha kepada petani anggota dalam rangka mekanisasi pertanian yang dapat mendukung usaha pengolahan produk turunan pangan. (2) JA akan mengadakan pelatihan bagi petani agar fokus pada produksi hasil pangan unggulan ekspor (Ehsam, 2012:).

Reformasi yang diinisiasi oleh JA selaras dengan program reformasi struktural pertanian oleh pemerintahan Abe. Reaksi politik ini menandakan bahwa TPP adalah faktor pendorong bagi JA untuk mempersiapkan sektor pertanian sebagai sektor yang mandiri, berbasis ekspor, dan berdaya saing global. Bagi pemerintah Shinzo Abe, TPP ini dapat dijadikan sebagai momen untuk mengurangi kekuatan politis JA terhadap petani nasional. Dalam rangka mempercepat agenda reformasi sektor pertanian dan realisasi perdagangan bebas TPP,

pada bulan Mei 2014, Pemerintah Abe membentuk sebuah "RUU Reformasi JA-Zenchu". RUU ini mengusulkan agar JA-Zenchu menjadi badan yang tidak berafiliasi politik. Kesuksesan RUU Reformasi JA menjadi barometer pemerintah untuk mengadakan agenda reformasi serupa di sektor lain. Strategi pemerintahan Shinzo Abe ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah akses pasar produk pertanian antara Jepang dengan Amerika Serikat (Stapczynski, The Epoch Times 2014).

Tekanan eksternal (*gaiatsu*) merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi pertimbangan pemerintah Jepang untuk terlibat ke dalam perundingan TPP. Intervensi pengaruh asing lebih mudah masuk dalam proses pembuatan keputusan TPP sebab rezim Shinzo Abe justru memanfaatkan tekanan asing sebagai penguat legitimasi politiknya dalam rangka menerapkan liberalisasi sektor pertanian yang sangat radikal bagi petani. Norma perdagangan dalam TPP sendiri bersifat sangat mengikat sehingga hal ini berimplikasi pada keharusan pemerintah Jepang untuk taat pada semua aturan TPP, tidak terkecuali liberalisasi sektor pertanian. JA memang gagal dalam memenangkan kontestasi politik pertimbangan keputusan TPP ini. Namun, JA masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya sebab perundingan TPP ini masih terus berlangsung dan belum menemui kesepakatan akhir. Padahal, sebuah perjanjian FTA (*free trade agreement*) akan membuahkan hasil apabila telah masuk ke tahap ratifikasi dan implementasi.

I. KESIMPULAN

Trans Pacific Partnership (TPP) merupakan pakta perdagangan bebas yang diikuti oleh 11 negara di Asia Pa-

sifik. TPP disebut juga sebagai WTO-plus sebab cakupan isu perdagangannya komprehensif dan mengatur isu baru yang belum pernah dirundingkan dalam kerangka WTO. Luasnya lingkup aturan TPP ini memicu friksi politik antarnegara anggota, salah satunya Jepang terkait item perdagangan yang masih sensitif seperti sektor pertanian. Resistensi Jepang beralasan karena kuatnya kekuatan politik di tingkat domestik. Pada awalnya, Jepang tetap mempertahankan proteksi pada lima komoditas pertanian (beras, gandum, daging sapi dan babi, produk olahan susu dan gula).

JA gagal memengaruhi pemerintah untuk menolak TPP. Kegagalan tersebut dibuktikan dengan partisipasi Jepang dalam TPP pada 15 Maret 2013. Faktor utama penyebab kegagalan JA adalah kuatnya pengaruh aktor eksternal (*gaiatsu*) yang menghendaki liberalisasi pertanian melalui intervensi politik domestik Jepang. *Gaiatsu* didominasi oleh Amerika Serikat yang paling dominan mendorong liberalisasi pertanian Jepang. Strategi yang digunakan Amerika Serikat antara lain (1) Amerika Serikat menjalin aliansi dengan negara anggota TPP eksportir pertanian terbesar, seperti Australia, Selandia Baru, dan Meksiko. Yang menginginkan akses pertanian ke pasar domestik Jepang, (2) AS berkompromi dengan aktor domestik (*naiatsu*) seperti *keidanren* dan birokrasi yang memiliki kepentingan sama dengan *gaiatsu*, yakni pro-liberalisasi pertanian.

Asesi Jepang dalam TPP memang menimbulkan pertentangan politik dalam negeri antara mereka yang mendukung liberalisasi perdagangan dan mereka yang menentangnya. METI mengejar liberalisasi perdagangan di TPP karena keinginan dari sektor manufaktur pangan yang sangat bergantung

pada pasar internasional. Sedangkan, MAFF menentang liberalisasi pertanian di TPP karena ingin melindungi kepentingan petani lokal. Kelompok petani yang tergabung di dalam JA-Zenchu memiliki hubungan politik yang erat dengan LDP. Keputusan PM Shinzo Abe untuk tetap melindungi lima komoditas pertanian di setiap perundingan TPP adalah langkah strategis untuk melanjutkan liberalisasi perdagangan tanpa mengorbankan dukungan politik domestik. Pemerintah Jepang ingin menerapkan contoh sukses perundingan FTA dengan Australia dan Singapura di dalam TPP, ketika kedua negara menyetujui eksklusif lima komoditas pertanian. Walaupun, FTA Jepang dengan kedua negara tersebut melalui serangkaian proses negosiasi yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ando, Takeshi, JA-EPA better than TPP, *Nikkei Business* (online), 7 February 2011, <<http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110203/218282/>> , diakses 14 April 2014.
- Asahi Shimbun, Pros and cons of joining TPP explained (online), 5 November 2011, <<http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ2011110516664>>, diakses 10 Desember 2013.
- Cheong, Inkyo. *Negotiations for the Trans-Pacific Partnership Agreement: Evaluation and Implications for East Asian Regionalism*. Tokyo: Asian Development Bank Institute. 2013.
- Chikako Mogi and Masaaki Iwamoto, "Abe Breaks Micro-Farms to End Japan Agriculture Slide: Economy", *Bloomberg* (online), 13 Desember 2013, <www.bloomberg.com/news/2013-12-12/abe-pushes-biggest-farm-revamp-since-macarthur-broke-landlords.html>, diakses 8 Maret 2014.
- Colignon, Richard. "The Resilience of Japan's Iron Triangle", *Asian Survey* Vol. 41 No.5 (2001): 866
- Dent, Christopher M. *New Free Trade Agreement in the Asia-Pacific*, New York: Palgrave Macmillan. 2007
- Elms, Deborah. *Agriculture and the Trans Pacific Partnership Negotiations*. Singapore: Temasek Foundation Center Nanyang Technological University. 2014.
- Esham, Mohamed, and Hajime Kobayashim. *Japanese Agricultural Cooperatives at Crossroads: A Review*. *American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci.*, 12 (7): 943-953, IDOSI Publications, (2012):950-951.
- Gobel, Rachmat, 'A Recovery in Japan's Economy Will Boost Indonesia', *The Jakarta Post* (online), 26 Februari 2014, <<http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/26/a-recovery-japan-s-economy-will-boost-indonesia.html>>, diakses 27 Februari 2014.
- Hanson, Daniel and Lara Crouch, "Why Japan Must Join TPP", *The Diplomat* (online), 5 Juni 2013, <<http://thediplomat.com/2013/06/why-japan-must-join-the-tpp/>>, diakses 3 Maret 2014.
- JA (The Central Union of Agricultural Cooperatives), *Objectives and Activ-*

- ities of JA (online), <<http://www.zenchu-Ja.or.jp/eng/objectives>>, diakses 29 November 2013.
- Japan Times, Defend Japan's Interest in TPP Talks (online), 24 April 2013, <<http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/04/27/editorials/defend-japans-interests-in-tpp-talks/>>, diakses 23 Mei 2014.
- Keidanren, Call for Economic Integration in the Asia-Pacific Region (online), 13 Desember 2011, <<https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2011/110proposal.html#part3>>, diakses 11 Maret 2014.
- Jiji, "Agriculture minister expects structural reforms to diminish JA presence", Japan Times (online), 5 March 2014, <<http://www.japantimes.co.jp/news/2014/03/05/business/agriculture-minister-expects-structural-reforms-to-diminish-ja-presence/#.UxnRoSGMpsE>>, diakses 8 Maret 2014.
- Krist, William. Negotiations for a TPP Agreement. Washington DC: Wilson Center. 2013.
- Mulgan, Aurelia George. Japan's Entry into the Trans-Pacific Partnership: Domestic Priorities and Regional Dynamics. The National Bureau of Asian Research. 2013.
- Mulgan, Aurelia George, "Japan's New Agricultural Policy Plan Neglects Trade Liberalisation", East Asia Forum (online), <<http://www.eastasiaforum.org/2011/11/02/japan-s-new-agricultural-policy-plan-neglects-trade-liberalisation/>>, diakses 21 April 2014
- Mulgan, Aurelia George, "Japan's TPP 'shock", East Asia Forum (online), <<http://www.eastasiaforum.org/2013/04/08/japans-tpp-shock/>>, diakses 27 Februari 2014.
- Mulgan, Aurelia George. The Politics of Agriculture in Japan. London: Routledge. 2003.
- Nippon Sangi-in (House of Council Diet Japan), Resolution on Japan's participation in the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations (online), <<http://www.sangiin.go.jp/eng/report/standing-committee/20130617-TPP.pdf>>, diakses 25 Mei 2014.
- Norinchukin Bank, What is the Norinchukin Bank (online), <<http://www.nochubank.or.jp/en/about/faq.html>>, diakses 8 Maret 2014.
- Posen, Adam S. "This is Japan's Chance to Lead TPP Talks", Asia Nikkei (online), 18 April 2014, <<http://asia.nikkei.com/Viewpoints/Economeister/Adam-Posen-The-great-opportunity-for-Japan-to-lead-TPP>>, diakses 25 Mei 2014.
- Putnam, Robert. Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-levels Games, International Organization. 1998.
- Stapczynski, Stephen, "Abe and Allies in LDP Take on JA-Zenchu", The Epoch Times (online), 10 June 2014, <http://www.theepochtimes.com/n3/blog/abe-and-allies-in-ldp-take-on-ja-zenchu/>, diakses 13 Juni 2014.
- Solís, Mireya, Japan's Big Bet on the Trans-Pacific Partnership: The TPP Nations Should Reciprocate, March 25, 2013, <http://www.brookings.edu/research/>

opinions/2013/03/25-transpacific-partnership-solis, diakses 3 Maret 2014.

The Asahi Shimbun, Asahi poll: 46% support participation in TPP talks (online), 15 November 2011, <http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201111150019>, diakses 26 Februari 2014.

The Asahi Shimbun, Pros and Cons of Joining TPP Explained (online), 5 November 2011, <<https://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ2011110516664>>, diakses 19 Desember 2013.

The Economist, Abe's Master Plan (online), 16 Mei 2013, <<http://www.economist.com/news/leaders/21578044-shinzo-abe-has-vision-prosperous-and-patriotic-Japan-economics-looks-better>>, diakses 27 Desember 2013.

United States Trade Representatives, Trans-Pacific Partnership: Summary of U.S. Objectives (online), <<http://www.ustr.gov/tpp/Summary-of-US-objectives>>, diakses 18 Maret 2014.